

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Tuntutan masyarakat atas tata kelola yang baik (*good governance*) pada pemerintah daerah maupun pusat. Oleh karena itu, dibutuhkannya laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sebagai bentuk tanggung jawab pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dan membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik secara baik.

Agar berguna dan bermanfaat, laporan keuangan pemerintah harus berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) yaitu dengan menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Selain itu, laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. Demikian juga informasi mengenai entitas pelaporan dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.

Selain itu, untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik, maka laporan keuangan pemerintah harus mempunyai karakteristik kualitatif keuangan. Karakteristik kualitatif keuangan ada 4 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Oleh karena itu, untuk mencapai itu semua dibutuhkan pemahaman akuntansi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah, karena dengan adanya pemahaman akuntansi dalam menyusun laporan akan membuat laporan pengelolaan keuangan efektif, sehingga penyajian laporan keuangan pemerintah baik dan benar. Selain itu, seseorang dikatakan memahami

tentang akuntansi bisa dilihat dari tingkat pemahaman akan komponen akuntansi itu sampai dengan menjadi sebuah laporan keuangan pemerintah. Komponen laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan (2016) menyatakan pemahaman akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini, dipengaruhi oleh tingkat pemahaman akuntansi pada lingkungan pemerintah sangat tinggi. Sejalan dengan penelitian Wirawan (2016) penelitian yang dilakukan Pamela (2013) juga menemukan hasil bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal sebaliknya dengan penelitian Inapaty dan Martiningsih (2016) menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pemahaman akuntansi yang dibutuhkan dalam membuat suatu laporan keuangan pemerintah yang baik dan benar. Selain itu, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) juga sangat dibutuhkan dalam membantu Pemerintah Daerah melakukan pencatan dan penjurnalan setiap transaksi-transaksi secara cepat, efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi akan membantu kinerja setiap karyawan, sehingga berpengaruh dalam mengurangi tingkat kesalahan pencatatan, kecurangan dan tindakan korupsi. Adanya pemanfaatan SIA akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pemerintah menetapkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 di mana disebut dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelola data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang di sajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Pamela (2013) menyatakan pemanfaatan sistem informasi akuntansi (SIA) berpengaruh secara positif terhadap laporan keuangan pemerintah. Sejalan dengan penelitian Pamela (2013) penelitian yang dilakukan oleh Antika (2017) juga menemukan hasil yang menyatakan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap efektivitas laporan keuangan daerah. Hal sebaliknya dengan penelitian yang dilakukan Diani (2014) yang mengemukakan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, sistem pengendalian internal sangat berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian internal juga bisa dijadikan ukuran dari kualitas laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah wajib untuk melakukan pemeliharaan terhadap sistem pengendalian internal pada setiap bagian-bagian yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada laporan keuangan pemerintah. Karena sistem pengendalian internal yang baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal bisa meminimalkan kecurangan maupun korupsi.

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Pada tahun 2015 opini wajar dengan pengecualian didasarkan pada sistem pengendalian internal yang lemah. Oleh karena itu, terjadi pencatatan yang seharusnya dilakukan secara tertib, tetapi tidak dilakukan secara tertib terkait klasifikasi jenis pengeluarannya. Pada tahun 2017 untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Penelitian yang dilakukan oleh Pamela (2013) yang mengemukakan kalau sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Yendrawati (2013) mengemukakan kalau sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan meskipun sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan sudah bagus, tetapi belum diterapkan secara efektif menyebabkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan kurang tepat. Sejalan dengan penelitian Yendrawati (2013) penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Anisma (2014) juga mengemukakan jika sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori dan uraian di atas, maka peneliti ingin menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi (SIA) dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Motivasi dilakukannya penelitian ini dikarenakan masih adanya kesenjangan terhadap penelitian sebelumnya. Selain itu, objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Madura.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Apakah pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

a Manfaat Akademik

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu terkait dengan bidang sistem informasi akuntansi dan bisa menjadi acuan untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b Manfaat Praktik

Memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep untuk upaya pengembangan dan peningkatan pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis penelitian dan metode penelitian.

##### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang desain penelitian, identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penyampelan yang digunakan dalam penelitian ini dan analisis data

#### BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

#### BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.